



APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



Scan untuk Unduh



#UangKita untuk Indonesia Maju, Berdaya
Saing, dan Inovatif



“Competitiveness berasal dari birokrasi dan regulasi yang efisien, itu semuanya yang kita lakukan melalui instrumen APBN”

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati



Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. **Pelindung:** Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. **Pengarah:** Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan **Penanggung Jawab:** Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite *Asset-Liability Management* Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan Redaksi:** Tim *Deputies Asset-Liability Management* Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim Teknis *Asset-Liability Management* Kementerian Keuangan **Desain Grafis dan Layout:** Biro KLI Kementerian Keuangan. **Alamat Redaksi:** Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.

DAFTAR ISI

Infografis Realisasi APBN s.d. 31 Oktober 2019	6
Ringkasan Eksekutif	7
Perkembangan Makroekonomi	14
Laporan Utama : APBN 2020: Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	16
Realisasi Pendapatan Pajak.....	22
Realisasi Kepabeanan dan Cukai	28
Laporan Utama : Dorong Stabilitas Ekonomi Dalam Negeri, Aturan Tarif Baru Untuk Tekstil Dan Produk Tekstil Impor Diterbitkan.....	30
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	32
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat.....	34
Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	42
Realisasi Pembiayaan Utang	46
Laporan Utama : DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperoleh penghargaan sebagai Public Debt Management Office of the Year dari GlobalMarket	58
Tabel Realisasi APBN s.d. 31 Oktober tahun 2018 dan 2019.....	62



Penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.173,89 triliun atau 65,71 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 1,18 persen (yoy) dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2018 sebesar Rp1.160,19 triliun.



Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp1.018,47 triliun atau 64,56 persen dari target APBN tahun 2019, naik sebesar 0,23 persen (yoy) dari tahun 2018 sebesar Rp1.016,17 triliun. Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp155,42 triliun atau 74,43 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 7,92 persen (yoy) dari tahun 2018 sebesar Rp144,02 triliun.



Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.121,10 triliun atau 68,60 persen dari pagu APBN tahun 2019, meningkat 4,35 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.074,40 triliun.



PNBP mencatat realisasi sebesar Rp333,29 triliun atau 88,10 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 3,16 persen (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp323,08 triliun.



TKDD mencapai Rp676,87 triliun atau 81,87 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh 4,71 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp646,42 triliun.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ditengah prospek perlambatan pertumbuhan perekonomian global, PDB Indonesia Triwulan III 2019 masih

tumbuh 5,02 persen (yoy). Stabilitas ekonomi yang terjaga mendorong Konsumsi rumah tangga (RT) dan lembaga non-profit rumah tangga (LNPR) tetap tumbuh kuat. Inflasi tetap terkendali dan pergerakan nilai tukar rupiah yang stabil dan cenderung menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) di triwulan III 2019 mengalami perbaikan defisit yang didorong oleh penurunan defisit Transaksi Berjalan dan peningkatan surplus Transaksi Modal dan Finansial. Kondisi ini diyakini akan memberikan pondasi kuat terhadap perkembangan ekonomi nasional hingga akhir tahun ini dan tahun depan.

Memasuki awal Triwulan IV 2019, kinerja realisasi pendapatan negara dan hibah masih tumbuh positif, meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga akhir Oktober 2019, realisasi pendapatan negara dan hibah telah

mencapai Rp1.508,91 triliun atau 69,69 persen dari target APBN 2019. Capaian tersebut tercatat masih mampu tumbuh positif sebesar 1,20 persen (yoy). Realisasi pendapatan negara meliputi realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.173,89 triliun, PNB sebesar Rp333,29 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,72 triliun atau masing-masing telah mencapai 65,71 persen, 88,10 persen, dan 395,55 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019. Pertumbuhan realisasi penerimaan perpajakan sebesar 1,18 persen (yoy), PNB tumbuh sebesar 3,16 persen (yoy), sedangkan untuk penerimaan hibah tumbuh negatif 77,92 persen (yoy). Penerimaan hibah masih tumbuh negatif akibat fluktuasi penerimaan jenis hibah tak terencana yang terjadi setiap tahunnya.

Realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp1.018,47 triliun atau 64,56 persen dari target APBN 2019, serta masih tumbuh sebesar 0,23 persen (yoy). Pencapaian ini terutama ditopang dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pertumbuhan PPH Nonmigas

utamanya didorong oleh pertumbuhan penerimaan PPh 25/29 Orang Pribadi (OP) dan PPh 21, yang masing-masing tercatat tumbuh sebesar 16,35 persen (*yoy*) dan 9,77 persen (*yoy*). Penerimaan PPh Pasal 21 masih tumbuh, seiring dengan tingkat serapan tenaga kerja. Sedangkan pertumbuhan PPh 25/29 OP masih mendapatkan dampak positif dari kenaikan kepatuhan pasca TA. Disisi lain, penerimaan PPh Migas tumbuh negatif 9,27 persen (*yoy*), yang diperkirakan terjadi akibat pengaruh tekanan pada harga minyak dunia dan ICP. Sementara itu, penerimaan kumulatif dari PPN/PPnBM juga masih mengalami pertumbuhan negatif 4,24 persen (*yoy*), membaik jika dibandingkan periode Januari-September yang tumbuh negatif 4,40 persen (*yoy*). Pertumbuhan negatif penerimaan PPN/PPnBM tersebut akibat kontributor utama penerimaan PPN/PPnBM yang berasal dari PPN DN dan PPN Impor masih tumbuh negatif masing-masing negatif 2,42 persen (*yoy*) dan negatif 7,42 persen (*yoy*).

Sementara penerimaan kepabeanaan dan cukai tercatat telah mencapai Rp155,42 triliun atau 74,43 persen dari target APBN 2019 dan mampu tumbuh positif sebesar 7,92 persen (*yoy*). Realisasi ini lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 74,26 persen dari target APBN 2018. Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai lebih dari 78 persen ditopang oleh penerimaan dari cukai, yang tumbuh 15,29 persen (*yoy*). Berdasarkan komponennya, pertumbuhan penerimaan cukai

utamanya berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tumbuh masing-masing sebesar 15,30 persen (*yoy*) dan 14,25 persen (*yoy*). Pertumbuhan penerimaan cukai didorong oleh efek kenaikan produksi akibat tidak adanya kebijakan kenaikan tarif CHT di tahun 2019, efek pergeseran pelunasan pita cukai, serta adanya kenaikan tarif cukai MMEA. Untuk penerimaan bea masuk (BM) telah terealisasi 77,52 persen dari target APBN 2019. Berdasarkan pertumbuhannya, BM secara kumulatif masih tumbuh negatif 6,25 persen (*yoy*). Menurunnya kinerja BM diperkirakan terjadi akibat moderasi impor Indonesia seiring dengan perlambatan perekonomian global yang menyebabkan penurunan devisa bayar impor. Penerimaan bea keluar (BK) mencapai 64,82 persen dari target APBN 2019 dan tumbuh secara kumulatif negatif 49,62 persen (*yoy*). Namun demikian, kondisi tersebut lebih baik dibandingkan dengan periode Januari-September yang tumbuh negatif 55,89 persen (*yoy*). Perbaikan pertumbuhan bea keluar bersumber dari sektor pertambangan yang terutama didukung oleh ekspor komoditas mineral.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan akhir Oktober 2019 mencapai Rp333,29 triliun atau mencapai 88,10 persen dari target APBN 2019. Capaian Realisasi PNBP ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,16 persen (*yoy*) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018. Realisasi Penerimaan PNBP Sumber Daya Alam

(SDA) mencapai Rp127,82 triliun atau 67,01 persen dibandingkan target dalam APBN 2019. Penerimaan tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp142,04 triliun. Hal ini dikarenakan melemahnya harga komoditas sumber daya alam akibat ketidakpastian global. Di sisi lain, penerimaan negara yang bersumber dari Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan mencapai Rp75,70 triliun atau sebesar 166,05 persen dari target APBN 2019. Peningkatan signifikan ini dikarenakan penerimaan dari bagian Pemerintah atas surplus Bank Indonesia yang tidak ditargetkan dalam APBN 2019 yang mencapai Rp30,09 triliun. Di sisi penerimaan PNBP Lainnya, sampai dengan bulan Oktober 2019 telah mencapai Rp92,13 triliun atau sebesar 97,94 persen dari target APBN 2019. Pendapatan BLU hingga Oktober 2019 telah mencapai Rp37,64 triliun atau 78,61 persen dari target APBN 2019. Meskipun capaian PNBP relatif cukup positif, Pemerintah senantiasa mewaspadaikan perkembangan harga komoditas maupun nilai tukar yang cukup berpengaruh terhadap kinerja PNBP.

Realisasi Belanja Negara sampai akhir Oktober 2019 mencapai Rp1.797,97 triliun (73,1 persen dari pagu APBN), meningkat 4,5 persen (*yoy*) jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2018. Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.121,10 triliun (68,6 persen dari pagu APBN) dan Transfer ke Daerah

dan Dana Desa sebesar Rp676,87 triliun (81,9 persen dari pagu APBN). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di bulan Oktober 2019 mengalami peningkatan sebesar 4,7 persen (*yoy*) dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, utamanya diakibatkan oleh realisasi Belanja Bantuan Sosial yang mencapai Rp91,75 triliun (89,9 persen dari pagu APBN) atau meningkat sebesar 32,7 persen (*yoy*) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah untuk senantiasa menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan dalam mencukupi kebutuhan hidup serta bagian dari upaya untuk mengurangi kesenjangan di Indonesia.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Oktober 2019 mencapai Rp146,19 triliun atau 65,2 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN. Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi Rp98,54 triliun (61,6 persen dari APBN 2019) dan subsidi nonenergi Rp47,65 triliun (74,0 persen dari APBN 2019). Untuk subsidi energi, realisasi tersebut telah memperhitungkan pembayaran atas volume BBM dan LPG tabung 3 kg serta penjualan listrik yang disalurkan dari Januari hingga September 2019. Realisasi belanja subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg mencapai Rp58,04 triliun, atau 57,7 persen dari pagu APBN, dengan realisasi volume 81,6 persen dari quota untuk jenis BBM dan 73,0 persen quota untuk LPG tabung 3 kg. Sementara itu, realisasi belanja subsidi listrik mencapai Rp40,50 triliun atau 68,3 persen dari pagu APBN. Secara umum, persentase realisasi subsidi

energi terhadap pagu anggaran 2019 dapat dikatakan lebih rendah dari target. Hal ini dipengaruhi oleh lebih rendahnya realisasi ICP (rata-rata US\$ 62/barel) dibandingkan dengan asumsi dalam APBN (US\$ 70/barel). Selain itu, dipengaruhi juga oleh terjadinya apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar selama periode Januari-September yang mencapai Rp14.174/dolar Amerika, dibandingkan dengan asumsi dalam APBN Rp15.000/dollar Amerika.

Hal serupa juga terjadi pada realisasi subsidi nonenergi. Rendahnya persentase realisasi terhadap pagu anggaran subsidi nonenergi utamanya terjadi pada *public service obligation* (PSO) dengan realisasi sebesar Rp2,18 triliun dan subsidi kredit program dengan realisasi sebesar Rp9,67 triliun. Rendahnya persentase realisasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh lambatnya penagihan dan proses verifikasi yang menjadi dasar pembayaran subsidi.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Oktober 2019 mencapai Rp676,87 triliun atau 81,87 persen dari pagu APBN 2019, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp624,91 triliun (82,58 persen) dan Dana Desa Rp51,96 triliun (74,23 persen).

Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp602,45 triliun (83,14 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp9,67 triliun (96,67 persen), dan Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp12,79 triliun (57,67 persen). Realisasi TKD sampai dengan Oktober 2019 tersebut lebih

tinggi Rp22,92 triliun atau sekitar 3,81 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2018. Tingginya realisasi TKD sampai dengan Oktober 2019 tersebut terutama disebabkan karena: (1) meningkatnya realisasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 19,77 persen apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena penyaluran DID hingga tahap II yang meningkat di sebagian besar daerah penerima DID termasuk Pemda yang terdampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah; (2) penyaluran DAK Nonfisik lebih tinggi 7,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) serta peningkatan koordinasi secara berkala dengan K/L teknis terkait dalam mendorong penyerapan di daerah; serta (3) realisasi Dana Alokasi Umum yang meningkat 4,06 persen terutama disebabkan meningkatnya penyaluran DAU regular kepada Pemda serta telah disalurkan DAU Tambahan tahap I dan II untuk bantuan pendanaan kelurahan. Sementara itu, realisasi Dana Desa sampai dengan Oktober 2019 lebih tinggi Rp7,53 triliun (16,96 persen) dibandingkan realisasi Dana Desa pada periode yang sama tahun 2018. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya penyaluran Dana Desa pada tahap I dan II serta adanya koordinasi dan sosialisasi secara intensif kepada

pemerintahan yang ada di daerah (Kabupaten/Kota dan Desa).

Realisasi defisit APBN hingga akhir Oktober 2019 mencapai Rp289,06 triliun atau sekitar 1,79 persen PDB.

Sementara realisasi pembiayaan yang dilakukan Pemerintah hingga Oktober 2019 adalah sebesar Rp373,37 triliun yang utamanya ditopang oleh realisasi pembiayaan utang Rp384,52 triliun. Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp401,71 triliun dan pinjaman (neto) sebesar negatif Rp17,19 triliun.

Realisasi pinjaman (neto) yang negatif tersebut mengindikasikan kondisi lebih tingginya pembayaran cicilan pokok pinjaman dibandingkan dengan penarikan pinjaman yang dilakukan Pemerintah. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk terus mendorong pengelolaan utang secara lebih *prudent* dan produktif antara lain dengan menjaga rasio utang dalam batas aman, mendorong peningkatan efisiensi pengelolaan utang, serta memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif.

Realisasi APBN sampai dengan Oktober 2019

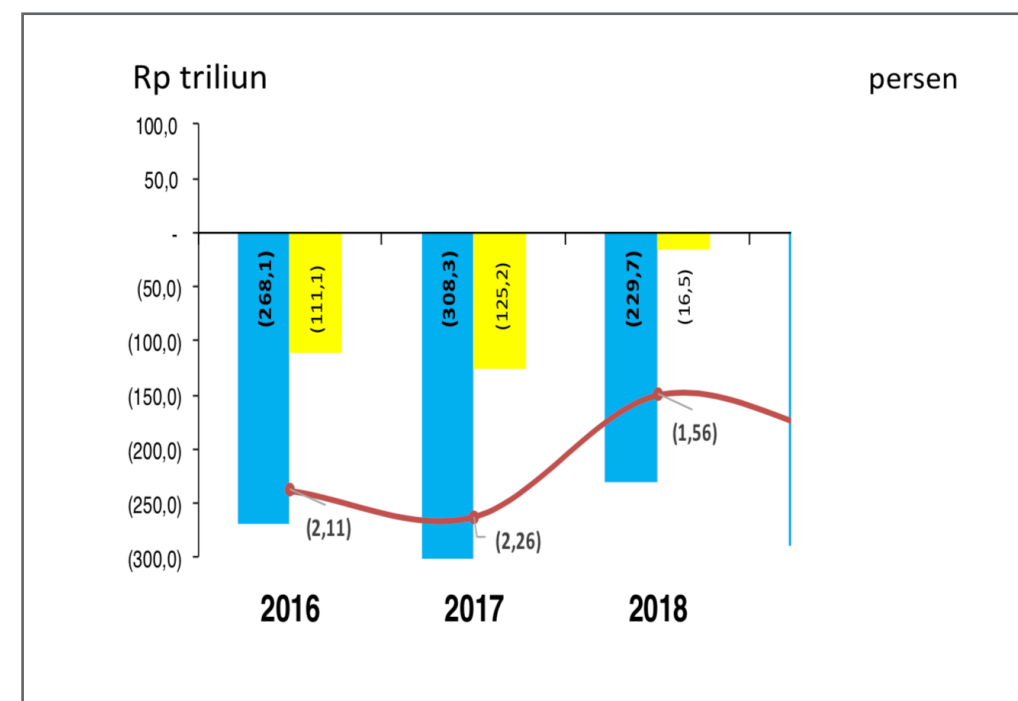
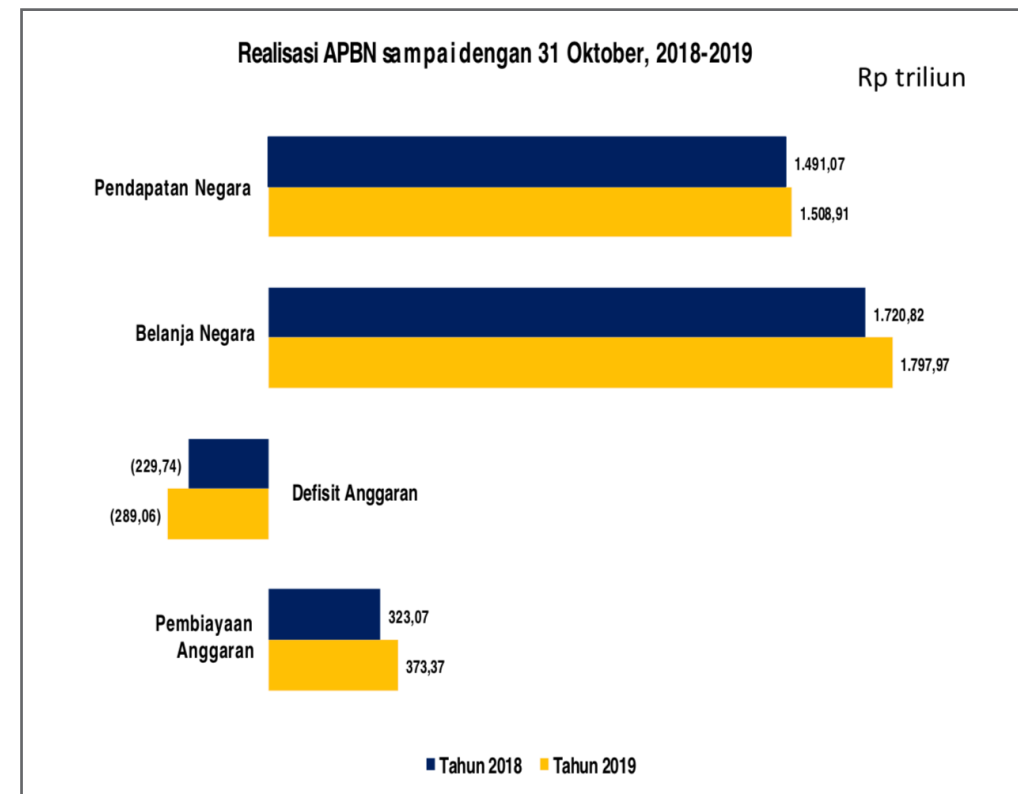
Realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober 2019 mencatatkan pendapatan negara mampu tumbuh 1,20 persen (*yoy*), mencapai Rp1.508,91 triliun atau 69,69 persen dari target APBN tahun 2019. Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.797,97 triliun atau 73,06 persen dari pagu APBN tahun 2019, meningkat 4,48 persen (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Rincian dari realisasi APBN 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 tersebut meliputi:

1. Penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.173,89 triliun atau 65,71 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 1,18 persen (*yoy*) dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2018 sebesar Rp1.160,19 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas:
 - Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp1.018,47 triliun atau 64,56 persen dari target APBN tahun 2019, naik sebesar 0,23 persen (*yoy*) dari tahun 2018 sebesar Rp1.016,17 triliun.
 - Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp155,42 triliun atau 74,43 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 7,92 persen (*yoy*) dari tahun 2018 sebesar Rp144,02 triliun.

2. PNBPN mencatat realisasi sebesar Rp333,29 triliun atau 88,10 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 3,16 persen (*yoy*) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp323,08 triliun.
3. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.121,10 triliun atau 68,60 persen dari pagu APBN tahun 2019, meningkat 4,35 persen (*yoy*) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.074,40 triliun.
4. TKDD mencapai Rp676,87 triliun atau 81,87 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh 4,71 persen (*yoy*) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp646,42 triliun.

Melihat realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka realisasi defisit APBN tahun 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 mencapai Rp289,06 triliun atau 1,80 persen terhadap PDB, dimana keseimbangan primer mencapai negatif Rp68,42 triliun. Adapun realisasi pembiayaan anggaran periode sampai dengan 31 Oktober 2019 sebesar Rp373,37 triliun, termasuk untuk pembiayaan investasi Rp11,90 triliun. Dengan demikian terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp84,31 triliun.



Perkembangan Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2019 tumbuh sebesar 5,02 persen (yoy).

Perekonomian Indonesia pada triwulan III 2019 tumbuh sebesar 5,02 persen (yoy) yang didorong oleh pertumbuhan permintaan domestik dan perbaikan sektor eksternal. Pertumbuhan permintaan domestik pada triwulan III 2019 didukung oleh terkendalinya stabilitas perekonomian domestik. Konsumsi rumah tangga (RT) dan lembaga non-profit rumah tangga (LNPR) tumbuh relatif stabil, dan secara total tumbuh sebesar 5,06 persen (yoy). Kinerja pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 4,21persen (yoy), sedikit melambat karena terpengaruh oleh kondisi ekonomi global yang belum kondusif dan tren harga komoditas primer yang rendah. Namun, tren pemulihan realisasi penanaman modal menunjukkan keberlanjutan hingga triwulan III 2019. Realisasi penanaman modal pada triwulan III 2019 mencapai Rp205,7 triliun atau tumbuh sebesar 18,4 persen (yoy). Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) tumbuh masing-masing sebesar 18,9

persen (yoy) dan 17,8 persen (yoy). Net Ekspor memberikan kontribusi positif karena adanya pertumbuhan ekspor pada triwulan III 2019 dan kontraksi pertumbuhan impor yang besar. Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor tumbuh positif dengan didorong pertumbuhan tinggi sektor jasa-jasa.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada Agustus 2019, TPT turun menjadi 5,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,34 persen. Kondisi ketenagakerjaan Indonesia pada Agustus 2019 juga ditandai dengan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan jumlah angkatan kerja. TPAK Agustus 2019 tercatat sebesar 67,49 persen atau 0,23 persen lebih tinggi dibandingkan TPAK Agustus 2018 sebesar 67,26 persen. Peningkatan TPAK ini mengindikasikan adanya potensi ekonomi dari sisi penawaran tenaga kerja. Kenaikan TPAK mendorong kenaikan jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus 2019 menjadi 133,56 juta orang, meningkat 2,55 juta orang

dibandingkan Agustus 2018. Komposisi angkatan kerja tersebut terdiri atas 126,51 juta orang yang bekerja dan 7,05 juta orang yang menganggur.

Perkembangan harga di tingkat konsumen pada Oktober 2019 menggambarkan terjadinya penurunan tekanan inflasi di tahun 2019. Inflasi Oktober 2019 relatif rendah sebesar 0,02 persen (mtm) atau 2,22 persen (ytd) atau 3,13 persen (yoy). Sebagian besar komoditas pangan mengalami penurunan, yaitu aneka cabai dan beberapa sayuran (peningkatan pasokan karena panen), dan telur ayam ras (turunnya permintaan), namun, terdapat tekanan dari kenaikan harga daging ayam ras dan bawang merah. Dengan realisasi ini, masih terdapat ruang gerak sebesar 1,28 persen untuk menjaga inflasi akhir tahun sesuai asumsi APBN 2019, yaitu 3,5 persen. Namun demikian, pemerintah tetap mewaspadaai risiko tekanan terhadap inflasi mengingat tekanan inflasi diperkirakan meningkat pada akhir tahun seiring dengan naiknya permintaan bahan pangan dan transportasi karena faktor HBKN Natal dan libur akhir tahun.

Tren nilai tukar Rupiah terus menguat karena adanya arus modal masuk seiring pelonggaran kebijakan moneter guna merespon prospek pelemahan ekonomi negara maju. Nilai Tukar Rupiah

terhadap dolar Amerika Serikat per 11 November 2019 tercatat pada level Rp14.020 per dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, Rupiah mengalami apresiasi sebesar 2,25 persen (ytd) dibandingkan awal tahun 2019. Namun demikian, kewaspadaan terhadap pembalikan aliran modal kedepan juga perlu diwaspadai. Sementara itu, cadangan devisa hingga akhir Oktober 2019 tercatat USD126,7 miliar meningkat dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar USD124,3 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut diyakini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan kedepan.

Kinerja pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun diperkirakan membaik didukung oleh konsumsi yang relatif stabil di tengah tingkat inflasi yang terjaga dan perbaikan pertumbuhan investasi sejalan dengan perbaikan iklim investasi. Kedepan, kinerja investasi langsung melalui penyaluran kredit perlu didorong untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di triwulan IV 2019. Perbaikan iklim investasi dan usaha di domestik yang terus dilakukan diharapkan juga mendorong kinerja pertumbuhan sektor-sektor utama seperti industri manufaktur, pertanian, konstruksi, dan perdagangan. Hal ini diharapkan akan mendorong kinerja perbaikan pertumbuhan ekonomi.



Foto Ilustrasi:
Media Keuangan/Resha AP

APBN 2020: Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secara resmi telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada sidang Paripurna DPR. APBN tahun 2020 akan difokuskan untuk mengakselerasi daya saing dan penguatan kualitas sumber daya manusia melalui seluruh instrumen fiskal yang ada baik sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Disamping itu, APBN tahun 2020 juga diarahkan semakin sehat dan adaptif dalam menghadapi risiko perekonomian dengan defisit APBN yang akan dijaga pada tingkat 1,76 persen terhadap PDB. Berikut ini adalah pokok-pokok kebijakan APBN tahun 2020:

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Perkembangan ekonomi global di tahun 2020 diproyeksikan relatif lebih baik, namun tingkat ketidakpastian

dan risiko yang membayangi masih sangat tinggi. Secara umum Pemerintah dan DPR sepakat atas asumsi dasar ekonomi makro yang diajukan Pemerintah di dalam RAPBN tahun 2020 kecuali pada harga dan *lifting* minyak bumi. Melihat perkembangan harga minyak dunia yang cenderung turun maka Pemerintah dan DPR menyepakati asumsi harga minyak mentah atau *Indonesian Crude Price* (ICP) pada tahun 2020 sebesar US\$63/barel atau lebih rendah dari usulan di dalam RAPBN 2020 sebesar US\$65/barel. Sementara itu, Pemerintah dan DPR sepakat bahwa di tahun depan *lifting* minyak dapat dioptimalkan menjadi 755 ribu barel/hari atau lebih tinggi dari usulan RAPBN 2020 sebesar 734 ribu barel/hari. Pemerintah akan terus mencermati dan mewaspadai risiko pelemahan ekonomi global sehingga mampu merespon risiko perekonomian ke depan dengan strategi kebijakan yang tepat dan efektif. Asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

No.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro	RAPBN	APBN
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,3
2	Laju Inflasi (%)	3,1	3,1
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/1USD)	14.400	14.400
4	Tingkat Bunga SPN-3 bulan (%)	5,4	5,4
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$ Barel)	65	63
6	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	734	755
7	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.191	1.191

Penerimaan Perpajakan

Target penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2020 menjadi Rp1.865,7 triliun meningkat Rp3,9 triliun dari RAPBN 2020 sebesar Rp1.861,8 triliun dengan *tax ratio* dalam arti luas sekitar 11,56 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh perubahan asumsi di dalam APBN 2020 khususnya *lifting* minyak, ICP, dan *cost recovery* yang disepakati menjadi US\$10,0 miliar dari US\$11,58 miliar. Selain menjadi sumber utama penerimaan negara, pajak akan menjadi instrumen dalam mendorong peningkatan iklim investasi dan daya saing melalui insentif fiskal antara lain: Insentif PPh dengan *super deduction* untuk kegiatan vokasi dan litbang, *mini tax holiday* untuk investasi sampai dengan Rp500 miliar, *investment allowance* untuk industri padat karya, PPh ditanggung Pemerintah antara lain untuk sektor panas bumi, PPh SBN Valas, dan Penghapusan Piutang PDAM 2020; dan Insentif PPN bagi impor dan penyerahan barang strategis, PPN tidak dipungut atas impor dan penyerahan jasa dan alat angkut tertentu (antara lain: kapal laut, pesawat udara, dan kereta api). Di sisi lain, penerimaan perpajakan

2020 juga akan didukung dengan kebijakan di sisi administrasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perbaikan kualitas pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan dengan penguatan sistem IT serta Implementasi Keterbukaan Informasi Perpajakan (AEol).

Sementara di sisi Bea dan Cukai target Kepabeanaan dan Cukai tahun 2020 sebesar Rp223,1 triliun meningkat Rp1,2 triliun dari RAPBN 2020 sebesar Rp221,9 triliun. Kebijakan kepabeanaan dan cukai tahun 2020 dilakukan melalui *extra effort* melalui kebijakan: penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dan pemberantasan pita cukai ilegal, ekstensifikasi barang kena cukai baru, melanjutkan program pemberantasan penyelundupan dan penertiban barang kena cukai ilegal, penertiban importir, eksportir, dan cukai berisiko tinggi, penyempurnaan implementasi sistem kepatuhan pengguna jasa (SKPJ), dan pengembangan/pelebaran fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) untuk industri kecil dan menengah (IKM).

Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP tahun 2020 ditargetkan Rp367,0 triliun meningkat Rp7,7 triliun dari RAPBN tahun 2020 sebesar Rp359,3 triliun. Peningkatan dipengaruhi oleh perubahan *lifting* minyak, ICP, dan *cost recovery* terutama yang bersumber dari PNBP migas. Upaya peningkatan PNBP didorong dengan pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang optimal, efektif dan efisien, peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif, peningkatan efisiensi BUMN dan kinerja BLU, serta penyempurnaan tata kelola. PNBP sektor nonmigas terus diperkuat disertai peningkatan layanan kepada masyarakat.

Fokus Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2020 sebesar Rp1.683,5 triliun (meningkat Rp13,5 triliun dari usulan RAPBN tahun 2020). Jumlah tersebut terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp909,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp773,9 triliun. Alokasi belanja Pemerintah Pusat tahun 2020 tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah yang efisien dan efektif, antara lain: peningkatan SDM yang berkualitas, penguatan program perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, birokrasi yang efisien dan efektif, serta antisipasi ketidakpastian termasuk mitigasi risiko bencana.

Belanja K/L tahun 2020 sebesar Rp909,6 triliun diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas

SDM dan beberapa kegiatan strategis antara lain: peningkatan kualitas SDM melalui KIP Kuliah, Kartu Pra Kerja, dan keberlanjutan penyediaan layanan kesehatan; penguatan program perlindungan sosial melalui perluasan akses pangan (Kartu Sembako); penguatan reformasi birokrasi dengan mempermudah pelayanan publik dan investasi; serta pembangunan infrastruktur antara lain pemerataan pembangunan antar wilayah dan percepatan pengembangan 5 destinasi wisata super prioritas.

Anggaran Pendidikan

Kebijakan anggaran pendidikan pada APBN tahun 2020 sebesar Rp508,1 triliun diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM sebagai bagian mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat, antara lain melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, beasiswa S2/S3 LPDP, BOS, BOP Paud, serta riset oleh LPDP dan Kemenristek. Anggaran pendidikan tersebut dialokasikan dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp172,2 triliun, dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp306,9 triliun, dan Rp29,0 triliun dari pengeluaran pembiayaan (antara lain DPPN, Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, Dana Abadi Perguruan Tinggi).

Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp132,2 triliun yang ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta penguatan

penanganan *stunting*. Jumlah tersebut terdiri atas anggaran kesehatan yang dialokasikan dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp97,2 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp34,9 triliun. Kebijakan yang dilakukan untuk peningkatan kualitas dan perbaikan akses antara lain melalui *refocusing* anggaran kesehatan, penguatan anggaran kesehatan untuk program *early childhood*, peningkatan dan pemerataan akses ke layanan kesehatan, serta peningkatan level efektivitas program JKN.

Anggaran Infrastruktur

Anggaran infrastruktur dalam APBN tahun 2020 mencapai Rp423,3 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi industrialisasi dan guna merespon revolusi Industri 4.0, mendorong pembangunan infrastruktur di perkotaan untuk antisipasi urbanisasi (antara lain transportasi massal perkotaan, air bersih dan sanitasi, dan perumahan yang layak huni), serta mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp856,9 triliun, lebih rendah Rp1,8 triliun dari RAPBN 2020 sebesar Rp858,8 triliun, diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif. Beberapa kebijakan TKDD

pada tahun 2020 antara lain:

- Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan sebesar Rp117,6 triliun dengan kebijakan menggunakan minimal 50 persen DBH Cukai dari Hasil Tembakau untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, memperluas penggunaan DBH Dana Reboisasi, memperkuat implementasi penggunaan 25 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk belanja infrastruktur.
- Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sebesar Rp427,1 triliun antara lain mendukung kebijakan bantuan pendanaan bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efektif melalui penambahan peran DAU (berupa dukungan pendanaan kelurahan, bantuan pendanaan penyeteraan penghasilan tetap perangkat desa, dan bantuan pendanaan Pegawai PPPK); penyempurnaan formulasi DAU untuk pemerataan kemampuan fiskal antardaerah; penguatan implementasi penggunaan 25 persen DTU untuk belanja infrastruktur.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dialokasikan sebesar Rp72,2 triliun. DAK Fisik diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan infrastruktur layanan publik, memperkuat kebijakan afirmasi, dan penambahan bidang Sosial dan Transportasi Laut.
- DAK Non Fisik dialokasikan sebesar Rp130,3 triliun. DAK

Non Fisik diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah, meningkatkan kualitas pengalokasian dan penyaluran, menyempurnakan *unit cost*, dan memuktahirkan data sasaran.

- Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sebesar Rp15,0 triliun. DID diarahkan untuk memperkuat instrumen insentif yang lebih fokus untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan kinerja daerah, penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan DID.
- Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sebesar Rp22,7 triliun, diarahkan untuk memperbaiki tata kelola Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur dengan memperkuat peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.
- Dana Desa dialokasikan sebesar Rp72,0 triliun, diarahkan untuk penguatan kapasitas SDM perangkat desa dan pendamping, penguatan monitoring dan evaluasi, serta pemberian insentif kepada desa dengan kinerja terbaik melalui Alokasi Kinerja (AK).

Pembiayaan Anggaran

- Target Pembiayaan Anggaran dalam APBN tahun 2020

sebesar Rp307,2 triliun atau sama dengan usulan dalam RAPBN tahun 2020. Pembiayaan Anggaran antara lain terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp351,8 triliun (dengan SBN neto sebesar Rp389,3 triliun) dan pembiayaan investasi sebesar Rp74,2 triliun. Arah kebijakan pembiayaan utang dilakukan dengan memenuhi aspek kehati-hatian serta didukung dengan tata kelola dan sistem manajemen risiko yang baik. Pengendalian rasio utang dalam batas aman berkisar 29,4 – 30,1 persen PDB untuk mendukung kesinambungan fiskal, menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi utang domestik dan valas dalam batas terkendali serta pendalaman pasar keuangan.

Postur APBN tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Postur APBN
Tahun Anggaran
2020

	RAPBN	APBN
Pendapatan Negara	2.221,5	2.233,2
Penerimaan Perpajakan	1.861,8	1.865,7
Penerimaan Negara Bukan Pajak	359,3	367,0
Penerimaan Hibah	0,5	0,5
Belanja Negara	2.528,8	2.540,4
Belanja Pemerintah Pusat	1.670,0	1.683,5
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	858,8	856,9
Keseimbangan Primer	(12,0)	(12,0)
Defisit Anggaran	(307,2)	(307,2)
% terhadap PDB	(1,76)	(1,76)
Pembiayaan Anggaran	307,2	307,2

PENDAPATAN PAJAK

Per 31 Oktober, Penerimaan Pajak Tembus
Angka Seribu Triliun

(dalam triliun Rupiah)

Realisasi Penerimaan Pajak s.d.	Uraian	APBN 2019	Realisasi Januari - Oktober 2019		
			Rp	Δ% 2018 - 2019	% thd APBN
	Pajak Penghasilan	894,45	605,90	2,15 %	67,74 %
	- Non Migas	828,29	556,63	3,30 %	67,20 %
	- Migas	66,15	49,27	-9,27 %	74,47 %
	PPN & PPnBM	655,39	388,00	-4,24 %	59,20 %
	PBB & Pajak Lainnya	27,71	24,57	37,58 %	88,68 %
	Jumlah	1.577,56	1.018,47	0,23 %	64,56 %

*angka sementara per Agustus 2019

Di bulan Oktober ini penerimaan pajak telah mencapai milestone seribu triliun rupiah. Per tanggal 31 Oktober 2019, capaian penerimaan pajak telah mencapai Rp1.018,47 triliun. Dengan demikian, atas target penerimaan pajak yang diamanatkan dalam APBN 2019 sebesar Rp1.557,56 triliun, 64,56 persen telah terealisasi. Capaian penerimaan pajak ini tumbuh 0,23 persen (yoy) bila dibandingkan penerimaan periode yang sama tahun lalu (Januari - Oktober 2018). Pertumbuhan penerimaan ini

didorong oleh peningkatan kinerja PPh Non Migas yang telah mencapai Rp556,63 triliun, tumbuh 3,30 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Realisasi PPh Non Migas sampai dengan Oktober pun telah mencapai 67,20 persen dari target, lebih tinggi dibandingkan capaian Oktober tahun lalu yakni sebesar 65,95 persen.

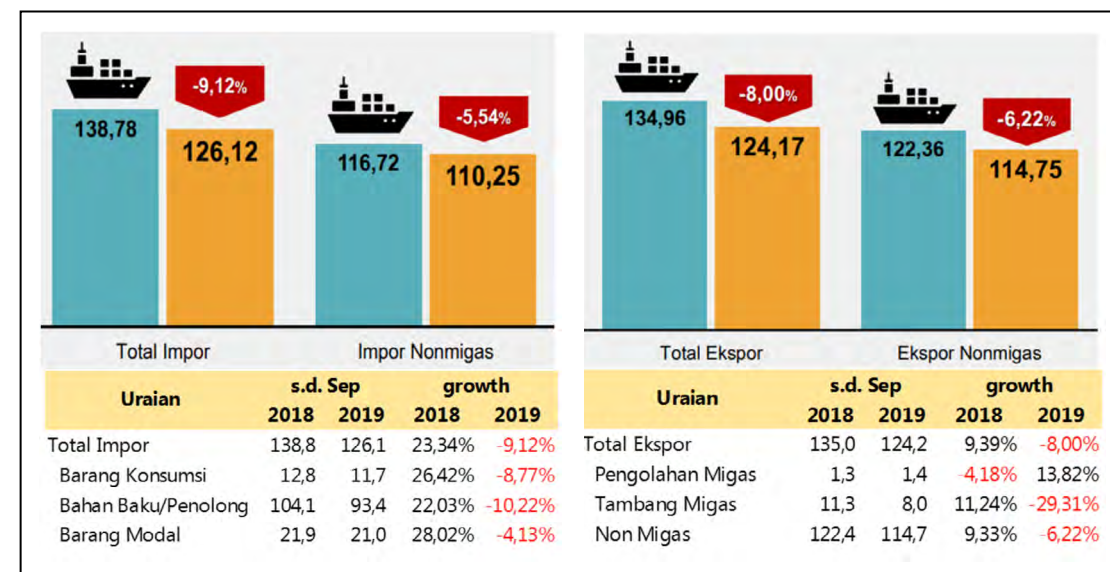
Memasuki triwulan IV 2019, kinerja penerimaan jenis-jenis pajak utama masih cukup stabil. Sebagai top performer, pertumbuhan PPh Pasal

Jenis Pajak	Realisasi Jan - Okt 2019	Δ% '18-'19 Jan - Okt
PPh Pasal 21	121,27	9,77 %
PPh Pasal 22	14,67	6,84 %
PPh Pasal 25/29	202,49	0,01 %
- Orang Pribadi	9,88	16,35 %
- Badan	192,60	-0,70 %
PPh Final	97,04	6,41 %
PPN Dalam Negeri	234,80	-2,42 %
Pajak atas Impor	189,63	-5,43 %
- PPh 22 Impor	44,98	-0,91 %
- PPN Impor	140,68	-7,25 %
- PPnBM Impor	3,97	14,98 %

**Pertumbuhan
Penerimaan
Pajak**

25/29 Orang Pribadi kini mencapai 16,35 persen (yoy), naik dari posisi sampai dengan bulan lalu yakni 15,35 persen (yoy). Kondisi ini diperkirakan stabil hingga akhir tahun, mengingat basis penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi utamanya berasal dari setoran masa (bulanan), sebagaimana telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2018. Demikian pula PPh Pasal 21 yang sampai dengan bulan Oktober masih menjadi kontributor utama pertumbuhan penerimaan pajak, dengan catatan pertumbuhan 9,77 persen (yoy), naik dari posisi sampai dengan bulan lalu yakni 9,71 persen (yoy). Kinerja PPh

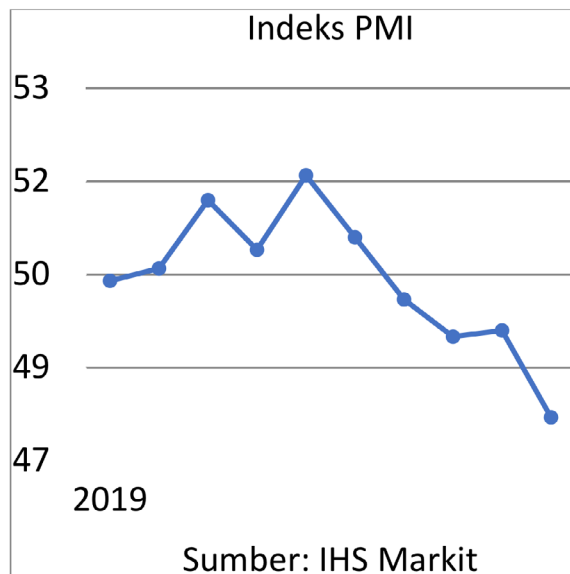
Pasal 21 diperkirakan akan tetap kuat seiring stabilnya fundamental ketenagakerjaan Indonesia. Hal ini tercermin pada data ketenagakerjaan BPS untuk Agustus 2019 (rilis 5 November): Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,28 persen (tahun lalu 5,34 persen) sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat 0,23 persen (yoy) dibanding tahun lalu. Jenis pajak lainnya yang juga menunjukkan kinerja yang stabil adalah PPh Pasal 22 dan PPh Final. Sampai dengan Oktober masih konsisten dengan pertumbuhan di atas 5 persen, masing-masing 6,84 persen dan 6,41 persen (yoy).



PPh Pasal 25/29 Badan dan PPN Dalam Negeri mengalami kontraksi dengan pertumbuhan sampai dengan Oktober 2019 masing-masing -0,70 persen dan -2,42 persen (yoy), diakibatkan besarnya restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) di awal tahun. Apabila efek program percepatan restitusi dikecualikan dari perhitungan, penerimaan bruto PPh Pasal 25/29 Badan dan PPN Dalam Negeri masih tumbuh 0,97 persen dan 5,31 persen (yoy). Belum maksimalnya penerimaan juga dipengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS (rilis 5 November), Ekonomi Indonesia di

triwulan III 2019 tumbuh 5,02 persen (yoy), melambat bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2019 yang tumbuh 5,05 persen (yoy). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan III 2019 sebesar 5,04 persen (coc), lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan sampai dengan triwulan III tahun lalu yakni 5,17 persen (coc), dan apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang juga 5,17 persen (yoy). Namun demikian, penerimaan di bulan Oktober menunjukkan perbaikan kinerja, dimana penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan tumbuh 8,54 persen (yoy)

Indeks PMI



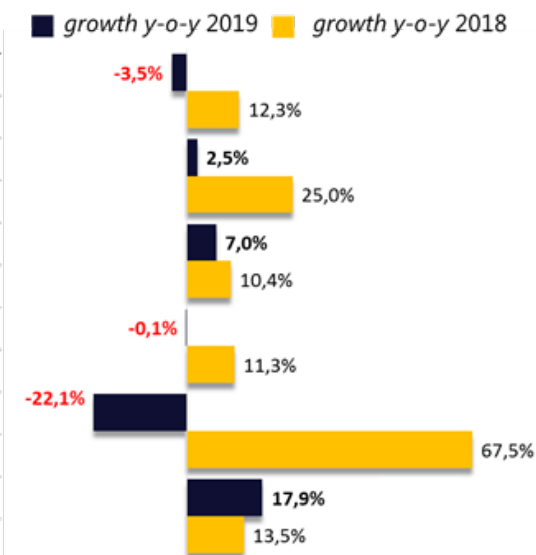
sedangkan PPN Dalam Negeri tumbuh 2,72 persen (yoy) terhadap bulan Oktober tahun lalu.

Pajak-pajak atas impor, selain dari PPNBM Impor yang tumbuh double digits 14,98 persen (yoy), secara umum masih mengalami kontraksi. PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor masing-masing tumbuh -0,91 persen dan -7,25 persen (yoy) akibat moderasi aktivitas impor. Nilai impor kumulatif Indonesia Januari – September 2019 berdasarkan data BPS (rilis 15 Oktober) adalah USD126.115,8 juta atau tumbuh negatif pada level -9,12 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Target pertumbuhan penerimaan

pajak atas impor tahun 2019 adalah sebesar 21,41 persen (yoy), namun sampai dengan 31 Oktober 2019, pertumbuhan realisasi penerimaan baru menunjukkan -5,43 persen (yoy). Moderasi impor ini, ditambah dengan masih lemahnya harga komoditas di pasar global, juga menjadi penyebab kontraksi penerimaan PPh Migas, yang sampai dengan bulan Oktober tumbuh -9,27 persen (yoy), serta terhadap sektor pertambangan secara umum, yang tumbuh -22,1 persen (yoy). Di sisi lain, penurunan kegiatan impor berdampak langsung terhadap output produksi karena sebagian besar komoditas impor adalah bahan baku dan barang modal. Akibatnya, penyerahan dalam negeri dan ekspor

Realisasi penerimaan pajak & kontribusinya

Industri Pengolahan	Rp	277,33T
		29,3%
Perdagangan	Rp	197,47T
		20,9%
Jasa Keuangan & Asuransi	Rp	137,38T
		14,5%
Konstruksi & Real Estat	Rp	64,80T
		6,9%
Pertambangan	Rp	47,39T
		5,0%
Transportasi & Pergudangan	Rp	40,32T
		4,3%



*penerimaan pajak sektoral non miqas, non PBB, dan non PPh DTP

juga mengalami kontraksi. Ekspor tumbuh negatif pada level -8,0 persen (yoy) sampai dengan September 2019, yang terutama dirasakan pada empat sektor-sektor utama: industri pengolahan, pertambangan, perdagangan

Kombinasi tekanan restitusi serta kondisi ekspor-impor tersebut menjadi faktor utama yang menekan kinerja sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Perlambatan ini juga tercermin pada indeks PMI bulan Oktober sebesar 47,7 yang merupakan PMI terendah Indonesia sejak 2016. Indeks PMI mulai menunjukkan trend penurunan sejak bulan Juni, dan mulai menunjukkan kontraksi (di bawah angka 50) pada bulan Juli. Akibatnya

penerimaan pajak dari sektor industri manufaktur mengalami kontraksi dengan pertumbuhan -3,5 persen (yoy), sedangkan sektor perdagangan masih mampu tumbuh 2,5 persen (yoy). Namun demikian, sebenarnya pertumbuhan bruto non impor kedua sektor ini masih relatif baik, masing-masing sebesar 5,5 persen (yoy) dan 8,5 persen (yoy).

Realisasi penerimaan pajak dan realisasinya

KEPABEANAN DAN CUKAI

Kinerja Cukai Hasil Tembakau Dorong Penerimaan Tumbuh Positif

Penerimaan kepabeanaan dan cukai per tanggal 31 Oktober 2019 telah mencapai Rp155,42 triliun atau 74,43 persen dari target APBN Tahun 2019. Capaian tersebut masih meneruskan tren positif sejak awal tahun 2019, dengan tumbuh sebesar 7,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja positif penerimaan didorong penerimaan cukai yang tumbuh signifikan sejak awal tahun.

Komponen penerimaan kepabeanaan dan cukai, antara lain bea masuk (BM), bea keluar (BK), dan cukai, sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal. Faktor eksternal dimaksud antara lain, kondisi geopolitik hingga perekonomian global, yang diperkirakan masih menekan volume perdagangan dan fluktuasi harga komoditas di pasar internasional yang berimbas pada perlambatan kinerja ekspor dan impor nasional.

Sedangkan faktor internal yang turut mempengaruhi adalah terbatasnya Barang Kena Cukai (BKC), kontraksi aktifitas ekspor dan impor, risiko menurunnya pasokan komoditas ekspor mineral tambang akibat kebijakan relokasi situs eksplorasi, peredaran BKC ilegal, dan tantangan untuk terus meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa.

Penerimaan cukai per 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp122,40 triliun atau 73,96 persen dari targetnya. Penerimaan cukai yang terdiri atas cukai hasil tembakau (HT), minuman mengandung etil alkohol (MMEA), dan etil alkohol (EA), tumbuh sebesar 15,29 persen (yoy) dibandingkan bulan Oktober 2018. Pertumbuhan pada penerimaan cukai tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi bila dibandingkan komponen penerimaan yang lain. Faktor kebijakan pelunasan pita cukai

dan program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) menjadi faktor pendorong penerimaan cukai tersebut.

Penerimaan cukai HT mempunyai porsi terbesar dalam penerimaan cukai, yang hingga 3 Oktober 2019 telah mencapai sebesar Rp116,83 triliun dan tumbuh 15,36 persen (yoy). Pertumbuhan signifikan cukai HT tersebut menjadi pendorong utama penerimaan cukai, bahkan total penerimaan kepabeanaan dan cukai. Kinerja tersebut akibat kebijakan relaksasi pelunasan pita cukai rokok kredit dan efektifitas program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) dalam mengurangi peredaran rokok ilegal.

Penerimaan cukai MMEA sampai dengan akhir Oktober 2019 telah mencapai Rp5,40 triliun atau tumbuh 14,27 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Tumbuhnya produksi MMEA dalam negeri sebagai akibat semakin kondusifnya daerah pasar utama, menjadi faktor positif penerimaan cukai MMEA. Sedangkan capaian cukai EA per 31 Oktober 2019 telah mencapai Rp0,10 triliun atau 65 persen dari targetnya.

Penerimaan BM hingga 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp30,16 triliun atau 77,52 persen dari target APBN Tahun 2019. Kinerja penerimaan BM mengalami tekanan sejak awal tahun, dimana pada bulan Mei yang mulai mengalami perlambatan dan masih berlanjut hingga bulan ini dengan tumbuh negatif 6,25 persen (yoy). Kondisi tersebut sebagai imbas perlemahan kinerja impor nasional yang lebih rendah dibandingkan tahun 2018, terutama aktifitas impor yang fasilitas.

Penerimaan BK sampai dengan akhir bulan Oktober 2019 telah mencapai Rp2,87 triliun atau 64,82 persen dari target yang diamanatkannya. Kinerja ekspor komoditas pertambangan, terutama konsentrat tembaga yang merupakan kontributor terbesar BK, tidak lebih baik dibanding kinerja tahun lalu.

Pelemahan kinerja tersebut sebagai akibat perubahan kebijakan eksplorasi perusahaan tambang utama, dan rendahnya harga komoditas di pasar global. Namun demikian masih terjadi pertumbuhan positif ekspor komoditas terkena BK, seperti nikel dan bauksit, meskipun belum mampu menutupi kinerja BK secara keseluruhan.

Dorong Stabilitas Ekonomi Dalam Negeri, Aturan Tarif Baru Untuk Tekstil Dan Produk Tekstil Impor Diterbitkan



Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk beberapa jenis barang impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 161/PMK.010/2019, PMK 162/PMK.010/2019, dan PMK 163/PMK.010/2019. Ketiga aturan

tersebut dikeluarkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk mengamankan industri dalam negeri serta mendorong penggunaan produk dari pasar domestik.

Melalui PMK 161/PMK.010/2019, Kementerian Keuangan telah menetapkan BMTPS terhadap produk benang (selain benang jahit) dari serat staple sintetis dan

artifisial yang diimpor mulai dari Rp1.405/Kg. Sementara, dalam PMK 162/PMK.010/2019, Kementerian Keuangan juga telah menetapkan BMTPS untuk produk kain yang diimpor mulai dari Rp1.318/meter hingga Rp9.521/meter serta tarif ad valorem berkisar 36,30 persen hingga 67,70 persen. Tidak hanya itu, dalam PMK 163/PMK.010/2019, Kementerian Keuangan juga mengenakan BMTPS terhadap produk tirai (termasuk gordena), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diimpor sebesar Rp41.083/Kg.

BMTPS diterapkan terhadap beberapa pos tarif dalam buku tarif kepabeanan Indonesia (BTKI). Penerapannya diberlakukan terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat staple sintetis dan artificial sebanyak 6 pos tarif, produk kain sebanyak 107 pos tarif, serta produk tirai (termasuk gordena), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya sebanyak 8 pos tarif dengan besaran tarifnya tercantum dalam PMK tersebut.

Ketiga aturan ini (PMK) mulai diimplementasikan pada tanggal 9 November 2019, dan akan berlaku selama dua ratus hari. Dengan implementasi aturan-aturan tersebut, maka diharapkan agar para pengguna jasa dapat mencermati isi aturan tersebut. Pengguna jasa dapat mengaksesnya melalui <http://www.sjdih.depkeu.go.id> atau <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-tarif-list2016.asp>.

Sementara itu, untuk memastikan implementasi aturan ini berjalan lancar tanpa mengabaikan pengawasan terhadap barang impor, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen risiko sesuai dengan PMK 225/PMK.04/2015 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Capaian PNBPN hingga Oktober 2019 telah mencapai 88,10 persen dari Target APBN

Realisasi PNBPN s.d. 31 Oktober 2019 (dalam miliar Rupiah, kecuali persentase)	2019	Realisasi		
	APBN	31 Oktober 2019	% thd APBN	Growth y-o-y (%)
I. Penerimaan Negara Bukan Pajak	378.297,86	333.291,30	88,10	3,16
A. Penerimaan SDA	190.754,77	127.818,00	67,01	(10,01)
1. Migas	159.778,31	100.502,60	62,90	(10,42)
a. Minyak Bumi	118.606,71	79.666,10	67,17	(28,99)
b. Gas Alam	41.171,60	20.836,50	50,61	-
2. Non Migas	30.976,46	27.315,40	88,18	(8,47)
B. Pendapatan dari KND	45.589,30	75.699,80	166,05	78,26
C. PNBPN Lainnya	94.069,33	92.130,80	97,94	(3,98)
D. Pendapatan BLU	47.884,45	37.642,70	78,61	(11,69)

Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019, realisasi PNBPN mencapai Rp333,29 triliun atau tumbuh 3,16 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp323,08 triliun.

Penurunan harga komoditas pertambangan seperti rata-rata ICP dan rata-rata Harga Batubara Acuan selama periode Januari-Oktober 2019 berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sampai dengan bulan Oktober 2019. Realisasi Penerimaan SDA sampai dengan Oktober 2019 mencapai Rp127,82 triliun, atau mengalami

pertumbuhan negatif 10,01 persen apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp142,04 triliun.

Untuk realisasi penerimaan SDA Migas mencapai Rp100,50 triliun atau 62,90 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 10,42 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp112,19 triliun. Penurunan penerimaan SDA Migas tersebut antara lain disebabkan lebih rendahnya rata-rata ICP periode Januari-Oktober 2019 yaitu

US\$61,8 per barel, yang lebih rendah dibandingkan rata-rata ICP pada periode yang sama tahun 2018 (US\$69,18 per barel).

Sedangkan untuk Realisasi penerimaan SDA Non Migas mencapai Rp27,32 triliun atau 88,18 persen dari target APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 8,47 persen (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp29,84 triliun. Hal tersebut disebabkan rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) Januari-Oktober 2019 rata-rata sebesar US\$80,36 per ton, lebih rendah dari periode yang sama tahun 2018 (US\$99,71 per ton).

Sementara itu, realisasi dari Kekayaan Negara Dipisahkan mencapai Rp75,69 triliun, atau mencapai 166,05 persen dari target dalam APBN 2019. Realisasi penerimaan dari KND ini meningkat secara signifikan yaitu 78,26 persen dari realisasi pada periode yang sama di tahun 2018 (Rp42,47 triliun). Peningkatan ini di antaranya disebabkan adanya setoran sisa surplus Bank Indonesia pada bulan Mei 2019 sebesar Rp30,09

triliun selain setoran dividen BUMN yang terealisasi sampai dengan bulan Oktober 2019 sebesar Rp45,6 triliun.

Realisasi penerimaan PNBPN Lainnya mencapai Rp92,13 triliun atau 97,94 persen dari target APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 3,98 persen (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp95,95 triliun.

Untuk pendapatan BLU sampai dengan akhir Oktober 2019 terealisasi sebesar Rp37,64 triliun atau mencapai 78,61 persen dari target APBN tahun 2019, atau turun sebesar 11,69 persen dari periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp42,63 triliun



BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan 31 Oktober 2019 masih ditopang oleh kinerja belanja K/L.

Realisasi Belanja Negara hingga 31 Oktober tahun 2019 telah mencapai Rp1.798,0 triliun atau 73,1 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi tersebut meningkat sebesar 4,48 persen (yoy) jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2018. Namun demikian, persentase penyerapan belanja negara periode ini menurun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018 yang sebesar 77,5 persen dari pagu APBN 2018. Dari keseluruhan realisasi belanja negara hingga 31 Oktober tahun 2019 tersebut, realisasi Belanja

Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 1.121,1 triliun (68,6 persen dari pagu APBN) dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp676,9 triliun (81,9 persen dari pagu APBN).

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Realisasi BPP sampai dengan 31 Oktober 2019 mengalami peningkatan sebesar 4,35 persen (yoy). Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh belanja K/L yang realisasinya mencapai 74,05 persen terhadap pagunya atau meningkat 7,98 persen jika dibandingkan dengan

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d Oktober 2019 (Yang dirinci: Belanja KL menurut jenis dan Belanja Non K/L).

	2019		Realisasi	
	APBN	s.d. Okt 2019	% thd APBN	% Growth (yoy)
Belanja Pemerintah Pusat				
Belanja K/L	855,45	633,45	74,05	7,98
Belanja Pegawai	224,41	204,44	91,10	12,51
Belanja Barang	344,64	236,50	68,62	3,52
Belanja Modal	189,34	100,76	53,21	(6,14)
Bantuan Sosial	97,06	91,75	94,53	32,70
Belanja Non K/L	778,89	487,65	62,61	(0,01)
al. Pembayaran Bunga Utang	275,89	220,64	79,98	3,48
Subsidi	224,32	146,19	55,57	(8,83)
Jumlah	1.634,34	1.121,10	68,60	4,35

realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan belanja K/L tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan kinerja belanja Bantuan Sosial yang telah mencapai Rp91,8 triliun (94,53 persen dari pagu APBN) atau meningkat sebesar 32,70 persen (yoy) dari periode yang sama tahun 2018. Meningkatnya kinerja belanja bantuan sosial tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam kebijakan peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat, antara lain dengan memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan melalui program-program seperti PKH, PBI, dan BPNT.

Sementara itu, kinerja realisasi belanja Non K/L mengalami penurunan sebesar 0,02 persen (yoy). Penurunan ini antara lain disebabkan lebih rendahnya realisasi belanja subsidi energi. Rendahnya realisasi subsidi energi tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi ICP yang lebih rendah dan apresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, serta pelunasan kurang bayar subsidi.

A. REALISASI BELANJA K/L TAHUN 2019

Berdasarkan Jenis Belanja

Pertumbuhan realisasi BPP K/L sebesar 7,98 persen (yoy) berasal dari meningkatnya realisasi Belanja Bantuan Sosial, Belanja Pegawai, dan Belanja Barang dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ketiga jenis belanja

tersebut kemudian mendorong pertumbuhan konsumsi, baik itu konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah yang lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, peningkatan kinerja belanja K/L terutama dipengaruhi oleh peningkatan kinerja belanja Bantuan Sosial Kinerja, dimana realisasi belanja bantuan sosial melalui K/L sampai dengan 31 Oktober 2019 mencapai 94,53 persen terhadap pagu APBN tahun 2019. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 89,44 persen dari pagu APBN tahun 2018. Meningkatnya realisasi belanja bantuan sosial tersebut menunjukkan bentuk keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sejak awal tahun, yang antara lain direalisasikan melalui: (i) pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mencapai 100 persen dari pagu, (ii) penyaluran PBI JKN tahun 2019 yang telah mencapai 99,7 persen, (iii) realisasi bantuan pangan yang mencapai 76,8 persen, dan (iv) realisasi Bansos lainnya (antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bidikmisi).

Realisasi belanja pegawai K/L juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 79,89 persen menjadi 91,10 persen pada periode sampai dengan 31 Oktober 2019. Peningkatan tersebut, selain disebabkan oleh kenaikan gaji pokok, pencairan THR dan gaji ke-13, juga disebabkan oleh kenaikan

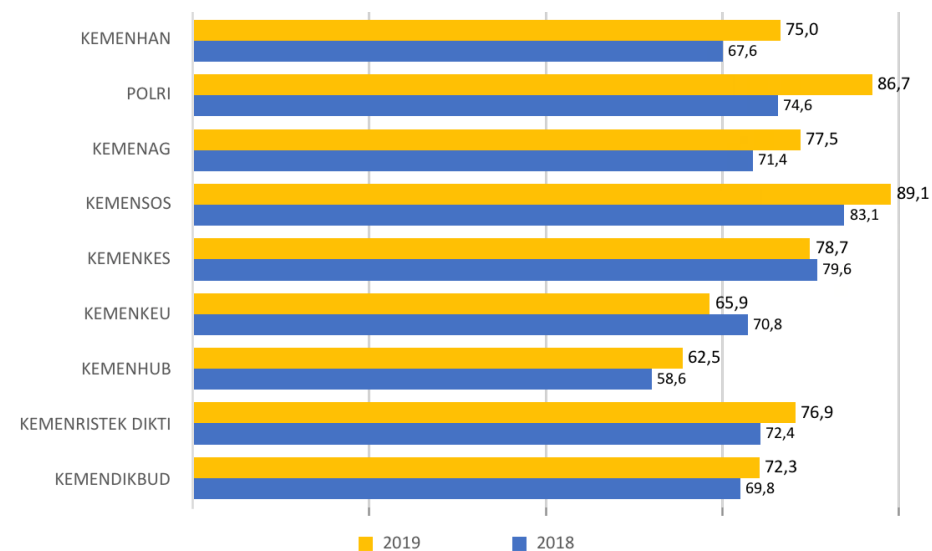
tunjangan kinerja pada beberapa K/L seiring dengan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L.

Sementara itu, realisasi belanja barang sampai dengan 31 Oktober 2019 mengalami peningkatan, yaitu dari 67,11 persen terhadap APBN tahun 2018 menjadi 68,54 persen terhadap APBN tahun 2019. Proporsi realisasi belanja barang yang terbesar digunakan untuk pelaksanaan, serta pengawasan Pemilu. Selain itu, untuk operasional fasilitas kesehatan (BLU Rumah Sakit), operasional fasilitas pendidikan (BLU Universitas), serta fasilitas peningkatan kualitas rumah swadaya berupa peningkatan kualitas atau pembangunan baru bagi rumah tidak layak huni yang dimiliki MBR, dan preservasi pemeliharaan rutin jalan oleh Kementerian PUPERA.

Di sisi lain, realisasi belanja modal sampai dengan 31 Oktober 2019 mengalami pertumbuhan negatif

sebesar 6,14 persen (yoy). Namun demikian, kinerja belanja modal pada periode tersebut membaik, dimana persentase penyerapan terhadap pagunya (53,21 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 (52,65 persen). Perlambatan pada belanja modal antara lain disebabkan oleh masih terdapatnya permasalahan ganti rugi lahan yang belum terselesaikan baik di Kementerian PUPERA maupun di Kementerian Perhubungan, serta hambatan payung hukum penugasan baru yang baru terbit di pertengahan tahun 2019 dan gangguan keamanan yang menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti di provinsi Papua dan Papua Barat. Realisasi belanja modal didominasi oleh (1) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, sebagai faktor pendorong investasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPERA dan Kementerian Perhubungan, dan (2) Belanja Modal peralatan dan mesin yang dilaksanakan oleh Kementerian

Tingkat Penyerapan Belanja K/L s.d. 31 Oktober 2019



Pertahanan, Kepolisian RI, dan Basarnas.

REALISASI BELANJA K/L

Kinerja belanja K/L sampai dengan 31 Oktober 2019 (74,05 persen) relatif lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja K/L pada periode yang sama tahun 2018 (69,23 persen). Hal ini tercermin pada grafik di bawah ini. Realisasi belanja K/L tersebut didominasi oleh 10 K/L terbesar (84,8 persen dari total belanja K/L), dimana tingkat penyerapannya sampai dengan 31 Oktober 2019 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Khususnya, yakni Kementerian Sosial yang telah merealisasikan pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) hingga 100 persen, serta penyaluran bantuan premi bagi PBI JKN tahun 2019 mencapai 99,7 persen dari alokasinya, realisasi bantuan pangan mencapai 76,8 persen dari pagu, dan realisasi Bansos lainnya seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bidikmisi. Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L, antara lain kelanjutan kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan melalui lelang dini dan beberapa kegiatan pendukung pelaksanaan Pemilu 2019.

Sementara itu, beberapa output strategis K/L sampai dengan bulan Oktober 2019 menunjukkan capaian yang positif, diantaranya penyaluran PKH yang telah mencapai 100 persen, PBI sebesar 99,7 persen, dan bantuan pangan sebesar 76,8 persen dari pagunya. Di samping capaian di bidang perlindungan sosial,

pembangunan infrastruktur juga terus memperlihatkan adanya progres seperti pembangunan jalan baru, pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan, dan pembangunan rel kereta api.

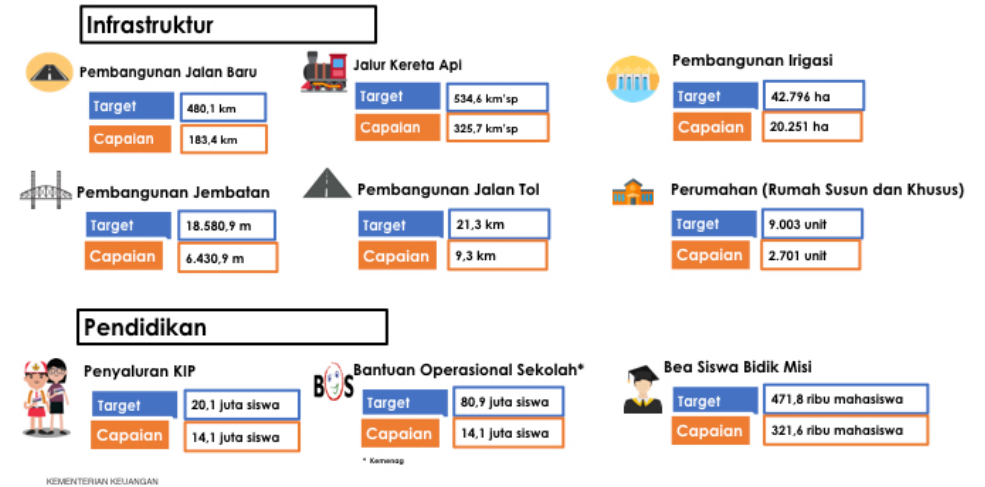
2. REALISASI BELANJA NONK/L TAHUN 2019

Realisasi belanja non-K/L sampai dengan 31 Oktober 2019 mencapai Rp487,64 triliun. Realisasi tersebut secara nominal sedikit lebih rendah jika dibanding dengan tahun 2018 yang mencapai Rp487,75 triliun. Namun demikian, secara persentase belanja non-K/L mengalami penurunan dari 80,4 persen terhadap APBN 2018 menjadi 62,6 persen terhadap APBN 2019. Penurunan realisasi belanja non-K/L terutama disebabkan menurunnya realisasi belanja subsidi.

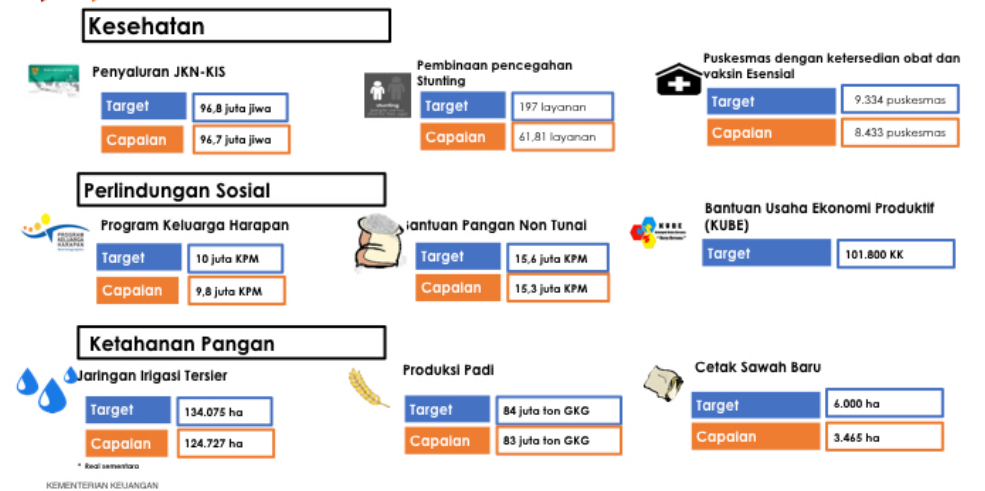
Belanja subsidi diarahkan untuk mendorong stabilitas harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat serta membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan komoditas barang subsidi dengan harga terjangkau, antara lain LPG Tabung 3 Kg, BBM jenis minyak solar dan minyak tanah, tarif listrik, dan pupuk. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah akan terus berupaya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi agar lebih tepat sasaran. Sampai dengan 31 Oktober 2019, realisasi belanja subsidi mencapai Rp146,19 triliun atau 65,2 persen dari pagu APBN tahun 2019 atau lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Subsidi energi merupakan faktor

Capaian beberapa output strategis K/L sampai dengan Agustus 2019



Capaian beberapa output strategis K/L sampai dengan September 2019



Tabel realisasi belanja non K/L sampai dengan Oktober 2019

Belanja NonK/L	2019			% Growth APBN
	APBN	s.d Okt	% thd APBN	
1. Belanja Pegawai	157,15	116,11	73,88	8,36
2. Pembayaran Bunga Utang	275,89	146,19	65,17	-8,83
3. Subsidi	224,32	220,64	79,98	3,48
JUMLAH	778,89	487,64	62,61	-0,02

penyumbang terbesar terhadap realisasi subsidi secara keseluruhan hingga akhir Oktober 2019 yang mencapai Rp98,54 triliun. Realisasi subsidi energi tersebut antara lain dipengaruhi oleh: (1) perkembangan realisasi ICP mencapai USD62/barel; (2) perkembangan realisasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat yang mencapai Rp14.173/USD; (3) volume konsumsi BBM bersubsidi, antara lain konsumsi solar yang mencapai 10,5 juta kilo liter (sampai dengan Agustus 2019); (4) volume konsumsi LPG 3 kg yang mencapai 4.542,1 juta Kg (sampai dengan Agustus 2019); serta (5) pembayaran kurang bayar subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp10,0 triliun. Adapun untuk realisasi subsidi non-energi hingga akhir Oktober 2019 mencapai Rp47,65 triliun, terutama

dipengaruhi oleh realisasi subsidi pupuk, subsidi bunga KUR, dan subsidi PPh DTP.

Sementara itu, realisasi pembayaran bunga utang sampai dengan 31 Oktober 2019 adalah sebesar 80,0 persen terhadap APBN 2019, atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 89,4 persen terhadap APBN 2018. Hal tersebut dikarenakan kondisi yield SBN yang cenderung menurun di awal tahun 2019 dibandingkan kondisi pada awal tahun 2018 sehingga biaya diskon cenderung lebih rendah. Selain itu, secara umum variasi komposisi penerbitan dan perbedaan jadwal pembayaran kupon SBN seri benchmark juga menyebabkan pembayaran bunga utang bersifat dinamis.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Tersisa 1 triwulan lagi, DID 2019 sudah tersalurkan 92 persen lebih.

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Oktober 2019 telah terealisasi sebesar Rp676,87 triliun atau 81,87 persen dari pagu alokasi. Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,71 persen (*yoy*).

1. DANA PERIMBANGAN

Hingga 31 Oktober 2019, Dana Bagi Hasil (DBH) telah disalurkan sebesar Rp70,30 triliun atau 66,10 persen dari pagu alokasi, mengalami kenaikan sebesar 1,69 persen (*yoy*). Angka tersebut dipengaruhi oleh adanya penyaluran sebagian Kurang Bayar DBH berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.07/2019 yang dilakukan pada bulan Mei dan Juli.

Dana Alokasi Umum (DAU) per 31 Oktober 2019 telah disalurkan sebesar Rp382,54 triliun atau 91,55 persen dari pagu alokasi, menunjukkan peningkatan sebesar 4,06 persen (*yoy*).

Dari keseluruhan realisasi tersebut, Rp2,61 triliun diantaranya adalah realisasi penyaluran DAU Tambahan dengan pagu Rp3,00 triliun.

Penyaluran DAU Bulan November, antara lain dipengaruhi oleh: (i) penundaan penyaluran DAU reguler terhadap 16 Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan laporan Informasi Keuangan Daerah (IKD) sebesar Rp121,05 miliar; (ii) penundaan penyaluran DAU reguler terhadap 34 Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian sebesar Rp145,88 miliar; (iii) penyelesaian kewajiban Daerah Induk kepada Daerah Otonom Baru (DOB) pada 4 pemerintah daerah sebesar Rp5,81 miliar; (iv) penyaluran kembali DAU reguler untuk 33 pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan Informasi Keuangan Daerah (IKD) sebesar Rp261,67 miliar; (v) penyaluran kembali DAU reguler

untuk 1 pemerintah daerah yang telah menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Semester I sebesar 16,9 miliar; dan (vi) penyaluran kembali DAU reguler untuk 6 pemerintah daerah yang telah menyampaikan komitmen pemenuhan ADD sebesar 28,66 miliar.

Realisasi DAU Tambahan sebesar Rp2,61 triliun atau 87,06 persen dari pagu alokasi adalah total penyaluran DAU Tambahan Tahap I kepada 403 Pemerintah Daerah sebesar Rp1,46 triliun (97,42 persen dari pagu tahap I) dan Tahap II kepada 324 Pemerintah Daerah sebesar Rp1,15 triliun (76,70 persen dari pagu tahap II).

Sampai dengan 31 Oktober 2019, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah sebesar Rp45,32 triliun atau 65,38 persen dari pagu alokasi. Berdasarkan daftar kontrak kegiatan yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan berakhirnya penyaluran tahap II pada akhir Oktober 2019,

outlook penyaluran DAK Fisik diperkirakan mencapai Rp64,8 triliun atau 93,5 persen dari pagu alokasi. Saat ini Kementerian Keuangan berupaya mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik tahap III melalui koordinasi dengan pemerintah daerah secara langsung maupun melalui Kementerian/Lembaga Teknis terkait. DAK Fisik tahap III akan disalurkan apabila pemerintah daerah menyampaikan persyaratan, antara lain: (i) laporan realisasi penyerapan dana minimal 90% dan capaian *output* minimal 70% yang telah direviu inspektorat daerah, serta (ii) laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian *output* 100% paling lambat 16 Desember 2019.

Per 31 Oktober 2019, penyaluran DAK Nonfisik telah terealisasi sebanyak Rp104,28 triliun atau 79,58 persen dari pagu alokasi. Jumlah ini menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 7,68 persen (*yoy*). Kepatuhan daerah yang

semakin baik dalam penyampaian laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), dan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) menjadi salah satu penentu capaian positif tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut adalah koordinasi yang terus dilakukan dengan seluruh Kementerian/ Lembaga teknis terkait untuk mendorong penyerapan di daerah melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan kegiatan lainnya.

2. DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Sampai dengan akhir Oktober 2019, DID telah tersalurkan sebesar Rp9,67 triliun atau 96,67 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 19,77 persen (yoy).

Dari total 336 Pemerintah Daerah penerima penyaluran Tahap I, 13 diantaranya adalah Pemerintah Daerah penerima DID yang terdampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Untuk penyaluran Tahap II, terdapat 298 Pemerintah Daerah yang telah menerima dengan total nominal sebesar Rp4,49 triliun.

3. DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) hingga 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp11,83 triliun

atau 56,39 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sampai dengan akhir oktober 2019, proses penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahap II untuk Provinsi Papua masih terus berjalan. Selanjutnya, untuk mengakselerasi penyaluran Dana Otsus Tahap III, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri terus mendorong daerah untuk segera menyampaikan dan melengkapi persyaratan penyalurannya.

Di sisi lain, Dana Keistimewaan Provinsi D.I. Yogyakarta sampai dengan 31 Oktober 2019 telah disalurkan sebesar Rp0,96 triliun atau 80,00 persen dari pagu alokasi, mengalami pertumbuhan sebesar 20 persen (yoy).

4. DANA DESA

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD per 31 Oktober 2019 telah terealisasi sebanyak Rp51,96 triliun atau 74,23 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 16,96 persen (yoy). Untuk mempercepat penyaluran Dana Desa Tahap III, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong daerah untuk segera memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III sebagaimana diatur dalam PMK No. 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Tabel realisasi
TKDD sampai
akhir Oktober

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2018		2019		% thd APBN
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766.162,58	646.418,88	826.772,53	676.867,28	81,87
Transfer ke Daerah	706.162,58	601.991,26	756.772,53	624.906,42	82,58
A. Dana Perimbangan	676.602,99	578.794,95	724.592,59	602.447,85	83,14
1. Dana Transfer Umum	490.714,92	436.751,78	524.223,75	452.843,32	86,38
a. Dana Bagi Hasil	89.225,34	69.129,55	106.350,16	70.299,68	66,10
b. Dana Alokasi Umum	401.489,58	367.622,22	417.873,58	382.543,64	91,55
2. Dana Transfer Khusus	185.888,07	142.043,17	200.368,84	149.604,53	74,66
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	62.436,26	45.199,21	69.326,70	45.323,13	65,38
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	123.451,81	96.843,97	131.042,14	104.281,40	79,58
B. Dana Insentif Daerah	8.500,00	8.071,63	10.000,00	9.667,22	96,67
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	21.059,58	15.124,69	22.179,94	12.791,35	57,67
1. Dana Otsus	20.059,58	14.324,69	20.979,94	11.831,35	56,39
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	8.029,79	6.022,34	8.357,47	3.635,50	43,50
b. Provinsi Aceh	8.029,79	6.022,34	8.357,47	6.268,10	75,00
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.000,00	2.280,00	4.265,00	1.927,75	45,20
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.000,00	800,00	1.200,00	960,00	80,00
Dana Desa	60.000,00	44.427,62	70.000,00	51.960,85	74,23



PEMBIAYAAN UTANG

Diversifikasi Pembiayaan Untuk Menjaga Keberlangsungan Pembangunan

Realisasi Pembiayaan Utang hingga akhir Oktober 2019 mencapai Rp384,52 triliun atau 107,03 persen target APBN yang terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp401,71 triliun atau 103,28 persen target APBN dan realisasi Pinjaman sebesar negatif Rp17,19 triliun atau 57,88 persen target APBN.

Akumulasi pinjaman yang terdiri atas pinjaman secara total mencapai angka negatif, seperti yang terjadi pada bulan-bulan sebelumnya, karena realisasi pembayaran cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri yang lebih besar dari pada penarikan Pinjaman Luar Negeri. Namun sebaliknya untuk Pinjaman Dalam Negeri, penarikan pinjaman lebih besar dibandingkan pembayaran cicilan pokok.

Hingga akhir Oktober 2019 Pemerintah telah membayarkan cicilan pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp1,00 triliun atau 67,88 persen dari target APBN, sementara cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri telah dibayarkan

sebesar Rp66,92 triliun atau 73,97 persen target APBN. Sementara itu, penarikan Pinjaman Dalam Negeri mencapai Rp1,23 triliun atau 63,10 persen target APBN dan penarikan Pinjaman Luar Negeri mencapai Rp49,49 triliun atau 82,11 persen target APBN.

Komitmen Pemerintah untuk mengelola pembiayaan utang secara pruden dan akuntabel tersebut seiring dengan komitmen untuk mewujudkan kualitas pembangunan yang semakin meningkat. Peningkatan kualitas pembangunan utamanya diwujudkan melalui peningkatan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial dan transfer ke daerah. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemerintah menggali ragam pembiayaan, yang mana salah satunya dilakukan melalui utang.

Pembiayaan utang digunakan sebagai alat untuk mengelola keuangan negara, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan belanja produktif di sektor prioritas yang

PEMBIAYAAN UTANG

OKTOBER 2019

REALISASI PEMBIAYAAN UTANG

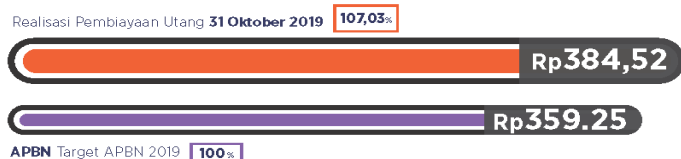
hingga akhir Oktober 2019

Mencapai:

Rp384,52 triliun

Realisasi Pembiayaan Utang

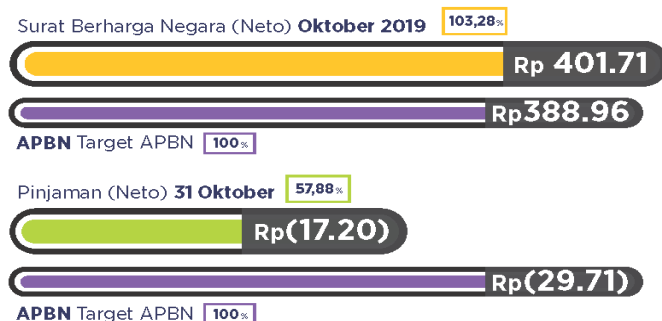
(dalam miliar rupiah)



Realisasi Pembiayaan Utang hingga akhir Oktober 2019 mencapai Rp384.52 triliun atau 107,03 persen target APBN yang terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp401,71 triliun atau 103,28 persen target APBN dan realisasi Pinjaman sebesar negatif Rp17,19 triliun atau 57,88 persen target APBN.

Realisasi dari APBN Sumber Pembiayaan Utang

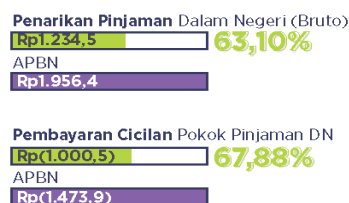
(dalam miliar rupiah)



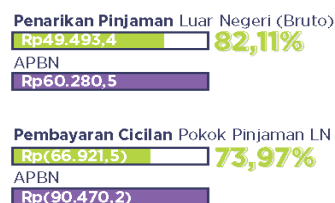
Akumulasi pinjaman yang terdiri atas pinjaman secara total mencapai angka negatif, seperti yang terjadi pada bulan-bulan sebelumnya, karena realisasi pembayaran cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri yang lebih besar dari pada penarikan Pinjaman Luar Negeri. Namun sebaliknya untuk Pinjaman Dalam Negeri, penarikan pinjaman lebih besar dibandingkan pembayaran cicilan pokok.

Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)



Pinjaman Luar Negeri (Neto)



mendesak. Pembiayaan melalui utang tersebut sebagian besar didapat dari penerbitan SBN, sedangkan sisanya didapat melalui pinjaman.

Salah satu hasil pembiayaan untuk proyek produktif yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 29 Oktober 2019 adalah Jembatan Youtefa di Teluk Youtefa, Provinsi Papua yang dibiayai dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara sebesar Rp1,3 triliun dan dilengkapi dengan kontribusi dana APBD Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kota Jayapura sebesar Rp500 miliar. Pembiayaan dari SBSN tersebut dilaksanakan dengan skema Multi Years Contract (MYC) mulai Tahun Anggaran (TA) 2015 sampai dengan TA 2019. Jembatan Youtefa menghubungkan Holtekamp dengan Hamadi dengan panjang rentang jembatan 1332 meter (732 meter jembatan dan 600 meter pile slab), serta jalan akses jembatan sepanjang 9950 meter, dengan lebar jalan 16 meter. Jembatan yang memiliki Tipe Jembatan Utama Pelengkung (*Continuous Steel Arch Bridge*) dan Pondasi Jembatan Utama *Bored Pile* ini dapat mempersingkat waktu tempuh dari Kota Jayapura ke perbatasan Skouw (perbatasan dengan Papua Nugini) dari 2,5 jam menjadi 1 jam. Hal tersebut dapat mendukung peningkatan mobilitas sumber daya

ekonomi. Selain menjadi sarana perhubungan yang memberikan keuntungan logistik, jembatan ini juga dijadikan obyek wisata oleh warga sekitar.

Pemerintah senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian (*pruden*), efisien, dan terukur (*akuntabel*) dalam mengelola utang. Hal ini diwujudkan ke dalam strategi jangka menengah dan tahunan pembiayaan melalui utang, yaitu untuk mengoptimalkan pembiayaan dalam negeri dan menggunakan pembiayaan luar negeri sebagai pelengkap. Selain itu, Pemerintah juga berupaya meningkatkan pendalaman pasar domestik dengan mengoptimalkan penerbitan SBN secara online. Dengan begitu, utang pemerintah dapat terjaga di batas aman dengan risiko yang terkendali.

Prinsip kehati-hatian, efisien dan terukur dalam pengelolaan utang oleh Pemerintah, pada bulan Oktober 2019 mendapat pengakuan internasional dari *the GlobalMarket* dengan diraihnya penghargaan sebagai Pengelola Utang Negara terbaik se Asia Pasific. Pengelolaan utang negara Indonesia dinilai amat berhasil dalam menurunkan biaya-biaya pinjaman serta menjaga risiko di tingkat yang terukur serta mendukung pasar domestik.

Jembatan Youtefa

Jembatan Youtefa, Teluk Youtefa, Papua.

- Panjang rentang Jembatan 1332 meter (732 meter jembatan dan 600 meter *pile slab*)
- Jalan Akses Jembatan sepanjang 9950 meter.
- Lebar jalan 16 meter.
- Tipe Jembatan Utama Pelengkung (*Continuous Steel Arch Bridge*)
- Pondasi Jembatan Utama *Bored Pile*.

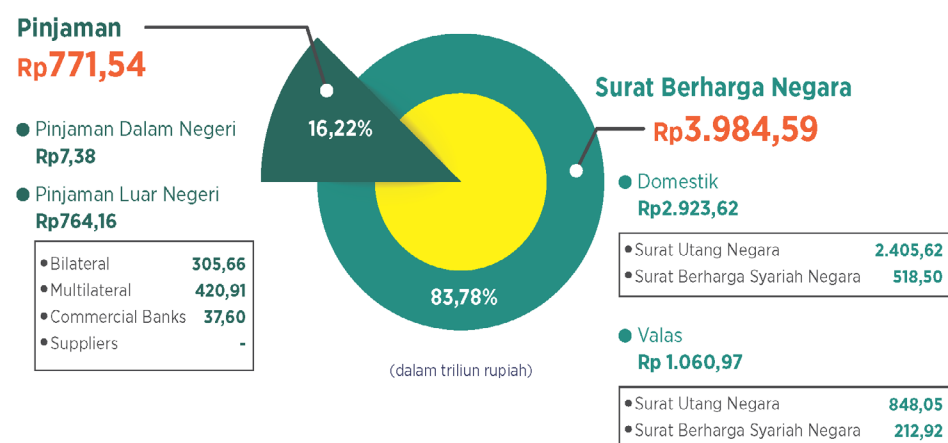
Pembiayaan dari SBSN dengan nilai Rp1,3 Triliun dengan skema Multi Years Contract (MYC) serta dilengkapi APBD Provinsi Papua dan Kota Jayapura sebesar Rp500 miliar dan dibangun mulai tahun anggaran 2015 s.d. 2019.

Kota Jayapura ke perbatasan Skouw (perbatasan dengan Papua Nugini) dari 2,5 jam menjadi 1 jam.

Pelaksanaan Pembangunan Jembatan oleh BUMN Karya, yaitu konsorsium kontraktor PT Pembangunan Perumahan, PT Utama Karya, dan PT Nindya Karya.

DIVERSIFIKASI PEMBIAYAAN UNTUK MENJAGA KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN

Posisi Utang Per Oktober 2019 Rp4.756,13 triliun



DEBT Debt to GDP : 29,87%

PDB** : Rp15.925,43

**Asumsi s/d Oktober 2019

Posisi Utang hingga akhir Oktober 2019

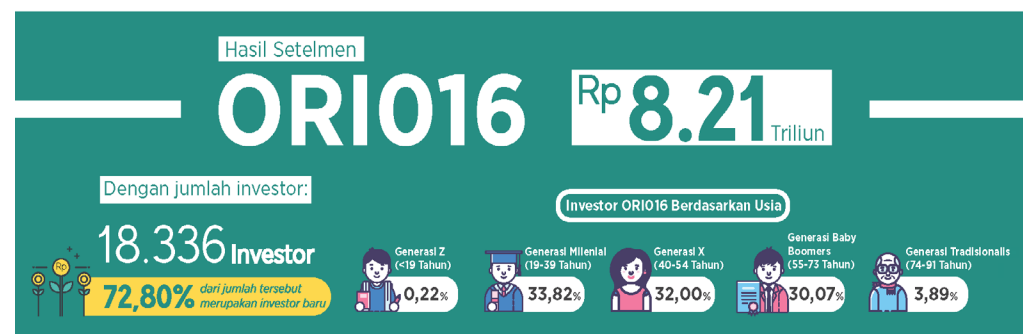
Posisi utang Pemerintah per akhir Oktober 2019 berada di angka Rp4.756,13 triliun, dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi 29,87 persen.

Komposisi Utang Pemerintah per akhir Oktober sebagian besar merupakan hasil dari kontribusi penerbitan SBN domestik. Pemerintah untuk tahun 2019 memang fokus pada pendalaman pasar domestik sebagai satu cara diversifikasi sumber pembiayaan. Diversifikasi sumber pembiayaan penting dilakukan untuk menjaga keberlangsungan sumber pembiayaan untuk pembangunan.

Keberlanjutan program pendalaman pasar melalui penerbitan SBN dilaksanakan melalui penerbitan ORI016 pada bulan Oktober 2019. Salah satu fitur baru dari ORI016 adalah seri ORI016 ini merupakan seri pertama ORI yang diterbitkan secara online melalui sistem e-SBN.

ORI016 ditawarkan pada tanggal 2 sampai dengan 24 Oktober 2019 dengan tingkat kupon sebesar 6,8 persen per tahunnya. Tingkat kupon tersebut lebih rendah dari seri SBN Ritel sebelumnya yaitu 7,2 persen, hal tersebut dikarenakan membaiknya kondisi pasar SBN dibandingkan pada saat penerbitan SBN Ritel seri sebelumnya.

ORI016 mencatat sejumlah capaian yang baik diantaranya 72,80 persen atau 13.349 orang investor ORI016 merupakan investor baru dengan jumlah investor terbesar berasal dari kalangan milenial yaitu 6.202 investor. Sementara dari segi volume, generasi baby boomers mendominasi dengan jumlah pemesanan sebesar Rp3.676,66 miliar. Adapun ORI016 meraup dana untuk pembiayaan sebesar Rp8,21 triliun.



DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperoleh penghargaan sebagai Public Debt Management Office of the Year dari GlobalMarket.



Sebagai pengelola utang Pemerintah, DJPPR memiliki 2 sasaran utama yaitu menurunkan biaya utang serta menjaga risiko di tingkat yang aman. Menurut the GlobalMarket, 2 sasaran utama tersebut bukan saja terpenuhi namun berhasil terlampaui oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Strategi pengelolaan utang DJPPR menurut the GlobalMarket telah jelas dari awal yaitu melakukan strategi *frontloading* untuk penjualan obligasi non rupiah di semester pertama 2019, serta menyelenggarakan lelang pada pasar domestik secara reguler untuk utang bermata uang rupiah, bergantian antara Sukuk dan Surat Utang Negara setiap minggunya.

Tahun 2018 merupakan tahun yang berat bagi pengelolaan utang Indonesia karena the Fed menaikkan suku bunganya sebanyak empat kali tahun lalu sementara Bank Indonesia juga menaikkan suku bunganya sebesar 175 basis poin sehingga tahun 2018 dapat dikatakan merupakan

tahun dengan tingkat suku bunga tinggi dan hal tersebut amat berpengaruh terhadap besaran yield Surat Berharga Negara.

Dari sisi global, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang (emerging market) yang mendapatkan arus modal masuk disebabkan karena kombinasi kebijakan *Dovish* dari the Fed serta *quantitative easing* dari bank sentral Eropa. Kemudian pada sisi lain, salah satu lembaga rating yaitu S&P (Standard and Poor's) menaikkan peringkat utang (rating) Indonesia karena menurut S&P ekonomi Indonesia terlihat cukup kuat.

Meski adanya peningkatan rating, namun Pemerintah tetap waspada terhadap volatilitas atau ketidakstabilan yang terjadi di pasar global sehingga Pemerintah akan selalu berhati-hati untuk menerbitkan surat utang. Strategi untuk menghadapi ketidakpastian dan ketidakstabilan pasar, adalah menggunakan strategi oportunistik. Apabila pasar kondusif, maka penerbitan surat utang akan ditingkatkan

DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperoleh penghargaan sebagai Public Debt Management Office of the Year dari GlobalMarket



Debt Management Office (DMO) Pemerintah memiliki 2 sasaran utama yaitu menurunkan biaya utang serta menjaga risiko pada tingkat yang aman.

Dibawah kepemimpinan Direktur Jenderalnya, Luky Alfirman, selama tahun 2018-2019 DJPPR dinilai mampu dengan luar biasa mengelola kedua sasaran utama tersebut serta meningkatkan pengelolaan utangnya satu tingkat ke atas.



"Tahun 2018 adalah tahun dengan tingkat suku bunga tinggi, namun tahun 2019 menjadi lebih baik", demikian menurut Luky Alfirman.



Pendekatan fleksibel tersebut telah dilaksanakan di tahun 2019. Indonesia, dengan rating Baa2/BBB/BBB, telah melaksanakan penawaran *triple tranche* sejumlah US\$3 milyar pada Desember 2018 untuk memenuhi target pembiayaan tahun 2019 dengan tenor 5 tahun, 10 tahun dan 30 tahun.

Kemudian dilanjutkan dengan penawaran sukuk sebesar US\$2 milyar pada bulan Februari yang terdiri atas Green Sukuk, penawaran sebesar US\$ 2 milyar bermata uang dolar dan euro pada bulan Juni.

Semua langkah tersebut menurut the GlobalMarket merupakan langkah yang tepat dan efektif sehingga the GlobalMarket menganugerahkan Pengelola Utang Terbaik Tahun 2019 se Asia Pasific (Public Debt Management Office of the Year, Asia Pacific) kepada Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh DJPPR. Gelaran penganugerahan penghargaan tersebut dilaksanakan di Washington DC.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Realisasi APBN s.d. 31 Oktober 2018 dan 2019

(dalam triliun rupiah)

URAIAN	2018			2019		
	APBN	Realisasi s.d. 31 Oktober	% thd APBN	APBN	Realisasi s.d. 31 Oktober	% thd APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.894,72	1.491,07	78,70	2.165,11	1.508,91	69,69
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.893,52	1.483,28	78,33	2.164,68	1.507,18	69,63
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.618,10	1.160,19	71,70	1.786,38	1.173,89	65,71
a. Pajak Dalam Negeri	1.579,40	1.122,33	71,06	1.743,06	1.140,87	65,45
b. Pajak Perdagangan Internasional	38,70	37,86	97,82	43,32	33,02	76,23
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	275,43	323,08	117,30	378,30	333,29	88,10
II. HIBAH	1,20	7,80	651,50	0,44	1,72	395,53
B. BELANJA NEGARA	2.220,66	1.720,82	77,49	2.461,11	1.797,97	73,06
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.454,49	1.074,40	73,87	1.634,34	1.121,10	68,60
1. Belanja K/L	847,44	586,65	69,23	855,45	633,46	74,05
2. Belanja Non /L	607,06	487,75	80,35	778,89	487,64	62,61
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766,16	646,42	84,37	826,77	676,87	81,87
1. Transfer ke Daerah	706,16	601,99	85,25	756,77	624,91	82,58
2. Dana Desa	60,00	44,43	74,05	70,00	51,96	74,23
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(87,33)	(16,52)	18,92	(20,11)	(68,42)	340,13
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(325,94)	(229,74)		(296,00)	(289,06)	
% Surplus / (Defisit) Anggaran thd PDB	(2,19)	(1,56)		(1,84)	(1,80)	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	325,94	323,07	99,12	296,00	373,37	126,14
al. PEMBIAYAAN UTANG	399,22	336,82	84,37	359,25	384,52	107,03
KELEBIHAN / (KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN		93,32			84,31	

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

